# **BAB 1**  **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

*Islamophobia* merupakan salah satu bentuk intoleransi dan diskriminasi yang dilatarbelakangi oleh ketakutan, ketidakpercayaan dan kebencian terhadap Islam dan pemeluknya, *Islamophobia* sering diwujudkan dalam kombinasi antara rasisme, *xenophobia*, sentimen anti-imigran dan intoleransi agama. Fenomena *Islamophobia* meliputi ujaran kebencian, serangan kekerasan dan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat negara. *Islamophobia* mulai ramai diperbincangkan sejak peristiwa serangan terorisme 9/11 yang terjadi di Gedung WTC Amerika Serikat. Komunitas Islam dianggap sebagai pelaku dari segala peristiwa terorisme di dunia sehingga terbentuk stigma bagi mereka atas tuduhan tersebut. Fenomena *Islamophobia* hingga saat ini masih terjadi di berbagai negara di dunia (Ushama, 2020).

Salah satu negara di Asia yang terpengaruh oleh *Islamophobia* adalah India, kebencian terhadap muslim bersama dengan bias terhadap pandangan Islam telah memicu ujaran kebencian, intoleransi dan diskriminasi di India sejak awal abad kedua puluh. Vinayak Damodar Savarkar, Keshav Baliram Hedgewar, Madhav Sadashiv Golwalkar, dan Bal Thackeray adalah aktor yang menyebarkan *Islamophobia* di India, karena pidato kebencian mereka dan tulisan-tulisan terhadap umat Islam sepanjang periode tersebut (Ushama, 2020).

Sejarawan berpendapat bahwa akar *Islamophobia* di India adalah pada saat masa Kekaisaran Mughal yang mereka anggap sebagai era gelap ketidakadilan besar terhadap umat Hindu. Mereka menganggap periode sebelum Islam mulai mendominasi India sebagai era kejayaan bagi peradaban Hindu. Oleh karena itu, kelompok nasionalis Hindu menganggap era tersebut sebagai peradaban yang mulia karena tidak adanya mayoritas Islam di wilayah tersebut. Namun, setelah berkembangnya migrasi menjadi fenomena global keberadaan umat muslim di India kembali mengalami peningkatan terutama pada masa kontemporer ini (Ushama, 2020).

**Gambar 1.1 Data Populasi Umat Muslim di India tahun 2016-2022**

Sumber: Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2022

Berdasarkan grafik tersebut, total populasi umat muslim di India mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 186 juta umat muslim di India dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 populasi umat muslim di India mencapai angka 200 juta. Hal tersebut menjadikan umat muslim di India berada di posisi kedua sebagai populasi terbesar di India setelah Hindu.

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang melewati batas negara, baik itu secara individu maupun berkelompok. Masyarakat yang menjadi pelaku migrasi disebut sebagai imigran. Imigran yang melakukan migrasi dapat terjadi karena keterpaksaan maupun secara sukarela, yang mengakibatkan perubahan tempat tinggal secara permanen maupun sementara. Migrasi dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu karena dinamika yang terjadi di negara asalnya seperti konflik, kebutuhan ekonomi, dan faktor lainnya yang dapat memicu para imigran untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik di negara lain.

Salah satu negara tujuan bagi para imigran di seluruh dunia adalah India, terutama bagi para masyarakat di negara tetangganya seperti Bangladesh dan Pakistan (Singh, 2020). India merupakan negara di Asia Selatan dengan tingkat ekonomi terbesar dimana India menempati urutan kelima sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB sebesar $4,12 Miliar. Faktor yang menyebabkan meningkatnya ekonomi di India terjadi karena keberagaman dan pertumbuhan yang begitu pesat di setiap sektor ekonominya, yang didorong oleh berbagai sektor seperti teknologi informasi, jasa, pertanian, dan manufaktur (Forbes India, 2024).

Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi negara-negara tersebut bermigrasi ke India terlepas dari besarnya kekuatan ekonomi yang dimiliki India dimana masyarakat yang berasal dari negara Bangladesh dan Pakistan melakukan migrasi karena konflik yang terjadi di negara asalnya seperti mengalami ketidakstabilan politik dan makro ekonomi menjadi alasan dari banyaknya masyarakat dari negara tersebut yang melakukan migrasi ke negara lain (Cheema et al., 2023).

Pada tahun 2019 Pakistan termasuk dalam 10 negara penyumbang imigran terbesar di dunia dengan total mencapai 6.3 juta imigran di seluruh dunia (United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2019). India merupakan destinasi bagi para imigran yang berasal dari Pakistan yang disebabkan oleh letak India yang strategis dimana india merupakan wilayah yang berbatasan secara langsung dengan Pakistan serta kemudahan dan terjangkaunya akomodasi perjalanan yang dapat digunakan melalui jalur darat seperti kereta api dan bus (Kumar Nanda, 2005).

Banyaknya imigran Pakistan di India tidak lepas dari pengaruh peristiwa pemisahan India dan Pakistan yang terjadi karena perbedaan kepercayaan dimana pada saat itu sebanyak 70% imigran Hindu menjadi mayoritas di India dan 25% adalah imigran muslim pada tahun 1947 yang akhirnya memecah kedua negara tersebut menjadi India dan Pakistan, dimana peristiwa tersebut merupakan awal dari perpindahan para imigran baik itu dari India maupun Pakistan (Ningsih, 2022). India juga menjadi negara tujuan bagi para imigran muslim Pakistan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik dari negara asalnya (Singh, 2020).

**Gambar 2.2 Data Arus Migrasi Imigran Pakistan ke India Tahun 2010-2020**

Sumber: UNDESA, 2020

 Arus migrasi imigran yang berasal dari Pakistan menuju India pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.14 juta imigran, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 1.1 juta imigran. Namun penurunan paling signifikan terjadi pada tahun tahun 2020, dimana tercatat sebanyak 833 ribu imigran yang bermigrasi ke India. Penurunan tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu banyak warga Pakistan yang lebih memilih untuk bermigrasi ke wilayah Timur Tengah. Selain itu, pada tahun 2019 juga India memberlakukan perubahan terhadap undang-undang kewarganegaraan yang membuat warga Pakistan lebih memilih wilayah lain untuk dijadikan destinasi migrasi (Singh, 2020).

**Tabel 1.1 Jumlah imigran di India, 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Negara Asal | Jumlah Imigran |
| TOTAL | 4,789,000 |
| Bangladesh | 2,488,000 |
| Pakistan | 833,000 |
| Nepal | 734,000 |
| Sri Lanka | 185,000 |
| China | 108,000 |

Sumber: UNDESA, 2020

Sebanyak 4,789,000 imigran yang bermigrasi ke India pada tahun 2020, dimana imigran Pakistan mencapai 833.000 orang yang bermigrasi ke India pada tahun 2020, menjadikan Pakistan sebagai penyumbang imigran di India terbanyak kedua setelah Bangladesh (Singh, 2020). (Singh, 2020). Pakistan merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan memiliki populasi muslim sebanyak 232 juta atau sekitar 96,5% dari total populasi di negaranya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar imigran yang memasuki wilayah India merupakan muslim (Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2023).

India merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu sebanyak 1 Miliar atau sekitar 78,9% dari total seluruh populasi di India dan penduduk yang beragama Islam sebanyak 208 juta atau sekitar 14% dari total populasi. Ketimpangan jumlah penduduk yang beragama Islam dan Hindu dan juga dengan adanya fenomena *Islamophobia* yang tersebar di India menimbulkan perilaku diskriminasi terhadap masyarakat Islam yang berada di India termasuk para imigran Pakistan (Pew Research Center, 2022).

Perilaku diskriminatif terhadap umat muslim yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di India tidak hanya dilakukan oleh para kelompok nasionalis Hindu atau kelompok Hindu konservatif yang ada di India. Diskriminasi yang terjadi biasanya terjadi dalam bentuk pembatasan terhadap akses ekonomi, sosial, maupun terjadi dalam segala bentuk kekerasan dan tindakan rasisme lainnya. Perilaku tersebut tidak lepas dari berbagai pengaruh yang salah satunya adalah pengaruh historis yang disebabkan oleh para aktor dalam kelompok nasionalis Hindu yang menggiring pandangan umat Hindu terhadap umat muslim di India (Ushama, 2020).

Diskriminasi terhadap muslim di India telah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu kasus yang menimpa imigran Pakistan adalah pengeboman yang terjadi pada kereta Samjhauta Express pada tahun 2007. Samjhauta Express merupakan kereta yang menjadi penghubung antara Kota Delhi di India dan Kota Lahore yang berada di Pakistan. Persitiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa yang sebagian besar merupakan warga negara Pakistan. Dalam proses penyelidikan, tanpa adanya bukti pemerintah India menuduh bahwa pemerintah Pakistan yang merupakan mayoritas muslim menjadi pelaku utama dari pengeboman tersebut. Tuduhan tersebut menjadi salah satu bentuk perilaku diskriminasi pemerintah India yang mencoba mendiskreditkan umat muslim sehingga kebencian terhadap umat muslim di India semakin meningkat (Qadir, 2024).

Selain peristiwa pengeboman *Samjhauta Express*, beberapa tahun berikutnya terutama setelah Narendra Modi terpilih menjadi Perdana Menteri India berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh umat muslim dan imigran Pakistan di India terjadi kembali. Sebagian besar kasus yang terjadi adalah pengecualian umat muslim dalam berbagai sektor kehidupan yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan dan kekerasan yang berujung pada pengrusakan lingkungan tempat tinggal dan pembunuhan (Human Rights Watch, 2020).

Meningkatnya kebencian terhadap muslim di India juga dipengaruhi oleh peran berbagai aktor dari Partai BJP (Bharatiya Janata Party) yang saat ini menguasai kursi pemerintahan India. Pada pemilu tahun 2019 slogan-slogan kebencian terhadap umat Islam di India disuarakan oleh partai tersebut, dimana salah satu slogan yang paling populer disuarakan adalah “India for Hindus Only”. Slogan tersebut turut disuarakan oleh kelompok nasionalis Hindu dan menuduh para imigran Pakistan mencoba untuk membuat “Pakistan Mini” di wilayah Tamil Nadu (Ushama, 2020).

Pemerintah India juga turut menunjukkan perilaku diskriminatifnya terhadap para imigran Pakistan, dimana dapat dilihat dilakukannya amandemen terhadap salah satu undang-undang yang dianggap sebagai upaya untuk mengatur imigran. Dalam mengatur para imigran yang berada di negara India, pemerintah India telah memberlakukan kebijakan yang bernama *Citizenship Act* atau undang-undang kewarganegaraan yang merupakan kebijakan untuk mengatur naturalisasi para imigran (Ushama, 2020).

Dalam perkembangannya, undang-undang tersebutterus mengalami amandemen atau pembaharuan hingga terakhir kali dilakukan pada tahun 2019, dimana Narendra Modi dari partai BJP memenangkan pemilu dan menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri India yang menjabat saat ini. Pada masa kepemimpinannya Narendra Modi memberlakukan suatu kebijakan yaitu *Citizenship Amendment Act* pada tanggal 9 Desember 2019. Undang-undang tersebut merupakan amandemen dari *Citizenship Amendment Act 1955* yang mengatur tentang pemberian status kewarganegaraan bagi para imigran. Pada undang-undang sebelumnya, para imigran perlu tinggal atau bekerja setidaknya 11 tahun sebelum mengajukan permohonan atas status kewarganegaraan dan diubah menjadi hanya 5 tahun. Selain itu, undang-undang tersebut juga menambahkan regulasi dimana hanya imigran yang beragama non-muslim saja yang mendapatkan kemudahan untuk menjadi warga India (The Citizenship (Amendment) Bill, 2019, n.d.).

Tidak lama setelah diberlakukannya amandemen terhadap undang-undang kewarganegaraan tersebut (CAA 2019) pada Desember 2019, para masyarakat muslim di India termasuk para imigran Pakistan melakukan protes sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut karena mereka merasa hak kewarganegaraannya telah terdiskriminasi bahkan oleh hukum dan pemerintah India itu sendiri. Para pengunjuk rasa melakukan aksinya dengan turun ke jalanan kota dan tersebar di berbagai bagian negara India (Arora et al., 2020).

Namun, kelompok nasionalis Hindu turut mengikuti aksi tersebut dengan tujuan untuk melawan para pengunjuk rasa yang menolak kebijakan tersebut sehingga demonstrasi yang terjadi justru semakin parah meluas hingga ke wilayah lainnya. Selain itu, demonstrasi tersebut berubah menjadi kerusuhan antar kelompok beragama dan terjadi bentrokan antara pasukan pengamanan dengan para pengunjuk rasa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari para pengunjuk rasa tersebut (Arora et al., 2020).

Dengan meluasnya demonstrasi ke berbagai wilayah di India para petinggi partai BJP yang merupakan bagian dari kelompok nasionalis Hindu merespon dengan mengatakan bahwa para pengunjuk rasa tersebut merupakan kelompok anti-nasionalis dan pro-Pakistan bahkan hingga menyerukan sorakan untuk menembak mereka. Hal tersebut mengakibatkan para kelompok nasionalis Hindu semakin menunjukkan perilaku diskriminasinya hingga melakukan aksi kekerasan terhadap umat muslim dan menghancurkan lingkungan tempat tinggal serta tempat ibadah para umat muslim tersebu. Selain terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berupa kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah India maupun kelompok nasionalis Hindu, para umat muslim India termasuk imigran Pakistan juga turut mengalami pelanggaran hak asasi manusia pada sektor kehidupan sosial dan ekonominya (Human Rights Watch, 2020).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “**Dampak Islamophobia terhadap Hak Kewarganegaraan Imigran Pakistan melalui Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan India (Citizenship Amendment Act 2019)”.**

## **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dipercaya dapat mempermudah proses analisis terkait permasalahan yang sedang penulis diteliti. Selain itu, perumusan masalah dapat menghasilkan dugaan serta adanya wujud asumsi sementara akan penelitian yang diteliti.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian yakni:

**“Bagaimana dampak perkembangan *Islamophobia* terhadap hak kewarganegaraan imigran Pakistan di India melalui *Citizenship Amendment Act 2019*?”**

## **Batasan Masalah**

Dikarenakan luasnya permasalahan mengenai pembahasan daripada topik penelitian tersebut, penulis perlu membatasi ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini membahas seputar kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019*.
2. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya meliputi seputar kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* dan dampaknya terhadap hak kewarganegaraan imigran Pakistan di India pada tahun 2016-2022.
3. Informasi meliputi: *Citizenship Amendment Act 2019*, serta dampaknya terhadap hak kewarganegaraan imigran Pakistan di India.

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan daripada penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika *Islamophobia* terhadap imigran Pakistan dalam kehidupan sosial masyarakat di India.
2. Untuk menganalisis isi kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* yang dinilai melanggar hak asasi manusia imigran Pakistan di India.
3. Untuk menganalisis dampak *Islamophobia* terhadap hak kewarganegaraan imigran Pakistan di India melalui kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019*.

###  **Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang hendak diteliti sejatinya diharapkan agar bisa dinilai berguna dalam berbagai macam aspek dan juga bidang tertentu, terutama pada bidang akademis baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka dari itu kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan mengenai masalah yang diteliti yaitu “*Citizenship Amendment Act 2019* (CAA 2019) sebagai dampak *Islamophobia* terhadap hak kewarganegaraan imigran Pakistan di India”.
2. Sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
3.
4.